

MODERNISASI: SUKABUMI DALAM ARUS PERUBAHAN SOSIAL EKONOMI ERA KOLONIAL BELANDA

Dimas Aldi Pangestu, Zulkarnain
Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta
e-mail: dimasaldi.2019@student.uny.ac.id, zulkarnain@uny.ac.id

Abstrak- Tujuan penulisan artikel ini adalah mengetahui bagaimana sejarah Sukabumi pada era kolonial Belanda dan mengetahui bagaimana faktor, klasifikasi dari perubahan sosial ekonomi, dan modernisasi di masyarakat Sukabumi di era kolonial Belanda. Metode dalam penulisan artikel ini adalah metode sejarah dari Kuntowijoyo yang mempunyai tahapan pemilihan topik, heuristic, kritik sumber, interpretasi dan historiografi. Sejak masa VOC hingga kolonial Belanda Sukabumi merupakan tempat budidaya komoditi perkebunan yang baik. Kopi dan teh adalah penghasil utama selain kina, karet, getah perca dan kapas. Penerapan Priangan Stelsel, Culturstelsel dan Agrariaschnwet di Sukabumi, tidak dapat terlepas dari perkebunan. Dampak positif dalam hal tersebut adalah memicu perubahan sosial ekonomi dan modernisasi. Faktor utama perubahan sosial ekonomi adalah kesuburan tanah dan suhu (faktor alam); penemuan baru (budidaya perkebunan); dan teknologi (kereta api). Sukabumi mengalami perubahan sosial dalam bentuk struktural, kultural dan interaksional. Sedangkan proses modernisasi pada penduduk Sukabumi dalam bidang budaya, politik, ekonomi, sosial dan life style.

Kata kunci: Sukabumi, Kolonial Belanda, Perkebunan, perubahan sosial ekonomi dan Modernisasi

MODERNIZATION: SUKABUMI IN THE CURRENT OF SOCIAL ECONOMIC CHANGE IN THE NETHERLANDS COLONIAL ERA

Dimas Aldi Pangestu, Zulkarnain
Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta
e-mail: dimasaldi.2019@student.uny.ac.id, zulkarnain@uny.ac.id

Abstract-*The purpose of this article is to find out the history of Sukabumi in the Netherlands colonial era and to know the factors, classifications of socio-economic change, and modernization in the Sukabumi. The method in this text is the historical method from Kuntowijoyo that has stages of topic selection, heuristics, source criticism, interpretation, and historiography. From the VOC era to the era of Netherlands colonial, Sukabumi was a better place for plantation commodities. Coffee and tea are the primary producers. The application of economic policy in Sukabumi remains on plantations. The positive impact is to trigger socio-economic change and modernization. The main factors of socio-economic change are soil fertility and temperature (natural), discoveries (plantation cultivation), and technology (rail). Sukabumi experiences social changes in structural, cultural, and interactional forms. Meanwhile, the modernization process of the Sukabumi population is in the fields of culture, politics, economy, society, and lifestyle.*

Keywords: Sukabumi, The Netherland Colonial Era, Plantation, Social-Economic Change, and Modernization.

Pendahuluan

Perubahan sosial ekonomi selalu terjadi di dalam masyarakat. Perubahan sosial ekonomi di berbagai daerah di dunia dapat dilihat dari bagaimana faktor penyebabnya hingga dampak yang terjadi bagi masyarakat. Perubahan sosial ekonomi dapat membawa dampak positif dan negatif bagi kehidupan suatu masyarakat. Perubahan sosial ekonomi mempunyai dampak positif dan negatif yang menjadi suatu dinamika di masyarakat.

Perubahan-perubahan sosial ekonomi terjadi dimasyarakat secara perlahan atau secara cepat. Perubahan sosial ekonomi yang terjadi dikarenakan oleh lingkungan kehidupan masyarakat yang terus berjalan dan kontak-kontak dengan budaya luar (Mulyadi, 2015, p.311). Kontak dengan budaya masyarakat luar merupakan faktor dari perubahan sosial ekonomi.

Perubahan sosial ekonomi yang terjadi di masyarakat karena beberapa sebab. Perubahan sosial mempunyai beberapa sebab karena kondisi alam, teknologi atau penemuan-penemuan baru, komposisi penduduk, konflik dimasyarakat, pemberontakan, peperangan, dan kontak dengan masyarakat lain (Lestari, 2008, p.22). Perubahan sosial mempunyai faktor-faktor yang dapat membawa perubahan didalam masyarakat.

Perubahan sosial ekonomi mempunyai dampak positif dan negatif. Dampak positif dari adanya perubahan sosial bagi masyarakat adalah adanya kesadaran, peningkatan ekonomi, keterbaharuan dan pola pikir yang maju. Sementara dampak negatifnya yaitu berkurangnya nilai adat istiadat, reorientasi padangan hidup, gaya hidup konsumtif, dan penyalahgunaan fungsi, (Suryanegara, Suorajaka & Nahib, 2015; Rahmayanti & Pinasti, 2017). Dampak positif dan negatif tersebut menjadi dinamika yang akan dialami oleh masyarakat. Perubahan-perubahan sosial ekonomi dapat diklasifikasikan menjadi beberapa bentuk.

Perubahan sosial ekonomi mempunyai beberapa bentuk. Menurut Himes dan Moore dalam Hatu (2011, pp.5-6) bentuk perubahan sosial dapat diklasifikasikan dalam tiga bentuk perubahan sosial ekonomi yaitu bentuk struktural, bentuk kultural dan bentuk interaksional. Bentuk struktural mengacu pada perubahan-perubahan dalam peranan baru

dalam kelas dan lembaga sosial. Sementara bentuk kultural mengacu kepada perubahan kebudayaan. Sedangkan bentuk interaksional, mengacu kepada hubungan sosial. Perubahan sosial salah satunya dapat dilihat dalam konteks modernisasi.

Modernisasi pada prespektif ilmu sosial mengacu kepada transformasi dalam keadaan yang maju menuju perkembangan ke arah yang lebih baik. (Rosana, 2015, pp.68-72). Modernisasi mengatur masyarakat atas dasar bisnis, produksi, konsumsi, dan komersialisasi. Masyarakat modern adalah evolusi dari masyarakat tradisional. Masyarakat modern mengalami perubahan sosial yang terjadi dari tradisional ke modern meliputi budaya, politik, ekonomi, sosial dan *life style*. Masyarakat modern merupakan suatu tatanan sosial yang mengedepankan rasionalitas, universalisme, spesialisasi fungsional dan tingkat pendidikan (Neolaka, 2019, p.15). Masyarakat modern di Indonesia sudah terdeteksi sejak dominasi kolonial Belanda.

Dominasi kolonial Belanda membawa kebudayaan Eropa Barat. Kebudayaan Eropa Barat perlahan meresap kedalam masyarakat koloni di Hindia Belanda. Meskipun pada kenyataannya, masyarakat koloni Hindia Belanda melakukan pembatasan-pembatasan sosial yang dilakukan oleh Pemerintah Hindia Belanda. Mereka membangun kebudayaan, teknologi, organisasi, dan sistem ekonomi seperti gaya Eropa Barat.

Hubungan antara kekuasaan Belanda dan kekuasaan tradisional di Hindia Belanda menunjukkan gejala yang berkebalikan. Kekuasaan Belanda makin meluas sementara kekuasaan kaum pribumi makin melemah. Pelemahan tersebut terjadi pada bidang sosial ekonomi karena pengaruh Barat yang diterapkan oleh Belanda mempunyai dampak dengan berkurangnya pengaruh kepala-kepala daerah dan pemimpin-pemimpin tradisional (Zakaria, 2015, p.97).

Eksplorasi ekonomi kolonial diatur dalam faktor-faktor produksi pertanian seperti kesediaan lahan dan tenaga untuk kepentingan kolonial. Eksploitasi terjadi dibidang pertanian dengan para petani diberi tugas untuk mengatur tanahnya supaya ditanami tanaman-tanaman ekspor. Sedangkan petani yang tidak mempunyai lahan diwajibkan ikut serta dalam kerja paksa untuk kepentingan kolonial (Zakaria, 2015, p.97).

Penataan ekonomi di Hindia Belanda menjadi kebijakan penting semenjak Inggris menyerahkan kembali kekuasaan kepada Belanda (1816). Penataan ekonomi menimbulkan perdebatan diantara kaum liberal dan konservatif, Mereka beradu argument dalam mengelola tanah jajahan untuk meningkatkan pendapatan dan membawa keuntungan bagi negeri induk.

Mereka beradu argumen dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan ekonomi. Golongan liberal berargumen supaya pengelolaan ekonomi mendukung investasi dalam skala besar. Sementara golongan konservatif berpendapat bahwa investasi dalam skala besar mempunyai banyak kerugian bagi koloni dan rakyat pribumi (Utami, 2015, p.52). Kedua golongan pada akhirnya sama-sama dapat menerapkan kebijakan menurut ide masing-masing. Golongan konservatif dapat menerapkan *cultuurstelsel* dan golongan liberal dengan kebijakan ekonomi liberalnya. Namun terkhusus daerah *Priangan*, penataan ekonomi sudah terjadi sejak pemberlakuan *Preangerstelsel* pada masa VOC.

Priangan merupakan daerah di wilayah Hindia Belanda yang subur. *Priangan* telah memberikan banyak hasil dalam produksi pertanian tanaman ekspor seperti tebu, nila, teh, kina dan kopi. Namun tanaman kopi merupakan yang utama dan aset berharga karena produksi kopi melimpah dan dapat mensejahterakan masyarakat (Handayani, 2017, p.222).

Produksi kopi dijalankan oleh petani kopi *Priangan* berdasarkan dengan *Preangerstelsel* kepada sistem ikatan desa yang feodal. Pada awal abad ke-19, sistem tersebut diganti dengan sistem sewa tanah (masa koloni Inggris dan komisaris Jenderal), *culturestelsel* (masa kolonial Belanda) dan penerapan Undang-Undang Agraria tahun 1870 (masa kolonial Belanda) (Handayani, 2017, p.222). Serangkaian kebijakan tersebut adalah bentuk dari penataan ekonomi dengan kebijakan sehingga membawa dampak yang besar bagi ekonomi negara induk.

Penerapan kebijakan dari *preangerstelsel*, *culturestelsel*, dan Undang-Undang Agraria 1870 dapat dilihat di daerah Sukabumi. Sukabumi merupakan wilayah yang berkembang semenjak penataan ekonomi

melalui kebijakan tersebut. Sukabumi berubah dari desa kecil di Gunung Parang menjadi wilayah Administratif yang mempunyai dampak ekonomi bagi pihak kolonial Belanda. Sukabumi mempunyai sejarah dalam gejala perubahan sosial ekonomi akibat dari serangkaian kebijakan yang berdampak ke berbagai macam faktor dalam kehidupan masyarakat. Sukabumi mempunyai sejarah yang berdampak kepada perubahan sosial ekonomi yang dapat dikaji dan ditelaah.

Berbagai kajian perubahan sosial ekonomi sebelumnya telah dilakukan terutama di *Priangan*. Seperti Hardjasaputra (2002) yang mengkaji perubahan sosial di Bandung 1810-1906. Pada kajian tersebut fokus kajian adalah menemukan faktor-faktor perubahan sosial yang ada di kota Bandung pada masa kolonial. Sementara perbedaan dengan artikel penulis adalah daerah yang dikaji. Selain itu, penulis berusaha mengklasifikasikan perubahan sosial ekonomi yang terjadi di Sukabumi menuju era modern.

Perubahan sosial ekonomi pada masa Belanda dapat dilihat dari berbagai macam factor. Selain itu, perubahan sosial ekonomi dapat diklasifikasikan berdasarkan pada pola dan ciri-ciri untuk menuju era modern. Berdasarkan kepada serangkaian latar belakang tersebut artikel ini mempunyai tujuan yaitu mengetahui bagaimana sejarah Sukabumi pada era kolonial Belanda dan mengetahui bagaimana faktor dan klasifikasi dari perubahan sosial ekonomi di masyarakat Sukabumi dari tradisional ke modern di era kolonial Belanda.

Metode Penelitian

Artikel ini menggunakan metode penelitian sejarah. Metode tersebut sesuai dengan pendapat dari Kuntowijoyo (2001, p.91) yang mempunyai langkah-langkah penyusunan diantaranya adalah: (1) pemilihan topik; (2) heuristik, (3) kritik sumber; (4) interpretasi dan; (5) historiografi.

Pemilihan topik dipilih berdasarkan kedekatan emosional dan intelektual. Emosional karena penulis berasal dan pernah tinggal di wilayah Sukabumi. Sementara kedekatan intelektual karena penulis seorang mahasiswa pendidikan sejarah yang tertarik

untuk memperdalam kajian sejarah sosial ekonomi Sukabumi. Heuristic menggunakan sumber primer dan sekunder berupa arsip, artikel jurnal ilmiah dan buku-buku. Sumber-sumber tersebut tersedia di perpustakaan daerah, arsip daerah, perpustakaan nasional, dan artikel jurnal.

Kritik sumber pada artikel ini dilakukan dengan menggunakan kritik internal dan eksternal. Melalui kritik sumber artikel ini mendapatkan ontensitas dan kredibilitas sumber. Tahap selanjutnya adalah interpretasi. Interpretasi yang dilakukan adalah untuk menggunakan data-data ontentik dan kredibel yang didapatkan untuk dilakukan analisis dan sintesis. Berikutnya data yang sudah disintesis ditulis dalam bentuk historiografi berupa artikel ilmiah pada artikel ini.

Hasil dan Pembahasan

Penetrasi orang asing di Sukabumi yang membawa perubahan sosial dan ekonomi terlihat semenjak zaman VOC (*Vrenig-de Oost-Indische Compagnie*) berkuasa. VOC mulai memanfaatkan Sukabumi sebagai tempat penanaman nila dan penambangan belerang. Sukabumi juga menjadi tempat dalam melakukan percobaan untuk menanam komoditi internasional yaitu kopi.

Perubahan sosial ekonomi dan modernisasi di Sukabumi mulai muncul tandatandanya pada masa VOC. Perubahan sosial ekonomi dan modernisasi dipicu oleh kontak dengan masyarakat luar. Perubahan sosial ekonomi dan modernisasi mempengaruhi komposisi penduduk dan serangkaian ujicoba untuk menanam tanaman yang laku diekspor dilakukan. Masyarakat luar, seperti orang-orang Eropa, menjalin komunikasi dengan masyarakat Sukabumi melalui usaha percobaan penanaman kopi. Mereka sukses memproduksi dan mengembangkan tanaman kopi di Sukabumi.

Kopi Malabar yang didatangkan oleh VOC dibawah Gubernur Jenderal Abraham van Rieebeck dicoba di wilayah Sukabumi. Kopi tersebut sukses dalam percobaan yang dilakukan Abraham van Rieebeck. Kopi mulai dibuka dalam skalan perkebunan di Gunung Guruh. Gunung Guruh dipilih karena menjadi tempat yang berhasil membudidayakan kopi. Budidaya kopi sukses dilakukan oleh Patih Wiranata yang menjadi bawahan dari Bupati

Cianjur Aria Wiradatu Datar III (Fajarani, 2012, pp.31-32).

Sukabumi menjadi tempat penghasil kopi pertama di Pulau Jawa pada tahun 1711. Sukabumi memproduksi jumlah kopi yang dihasilkan sebanyak 1.216.257 pikul (Fajarani, 2012, pp.31-32). Keberhasilan tersebut membawa perubahan sehingga berdampak kepada perubahan budaya yang dipaksakan. VOC mewajibkan kerja bagi penduduk Priangan khususnya Sukabumi yang disebut *Preangerstelsel*.

Preangerstelsel merupakan sistem yang menempatkan Bupati Priangan mempunyai otonom lebih besar dibandingkan Bupati wilayah (Bremen, 2014, pp.198-199). Melalui hal tersebut maka terdapat perubahan dalam lembaga sosial. Perubahan pada lembaga sosial disebabkan oleh pengaruh kontak dengan masyarakat luar yang lebih dominan kekuatannya dan menjanjikan keuntungan.

VOC memanfaatkan pengaruh dan peranan para bupati serta bangsawan Priangan untuk melaksanakan *Preanger Stelsel*. VOC memberikan *premi* atau hadiah kepada Bupati dan bangsawan atas keberhasilannya membuka perkebunan kopi di daerahnya masing-masing (Jaya, 2002, p.37). VOC juga mengatur komposisi penduduk untuk melaksanakan *Preangerstelsel*.

Orang-orang Cina pada masa VOC tertutup rapat ke Priangan. Mereka hanya diizinkan untuk mengoperasikan pabrik gula di *Ommelanden* Batavia. Mereka mempunyai alasan untuk diberlakukan khusus karena mereka dipandang sebagai potensi bahaya bagi sistem monopoli Belanda. Mereka dicurigai secara diam-diam mencari hasil dari tanaman asli (Melly, 1963, p.4). Orang-orang Cina dan Timur Asing dibatasi kebebasannya karena adanya ketakutan kerugian yang dialami oleh VOC. VOC memperketat kebijakan untuk menghindari potensi persaingan dagang dengan mereka dan menjaga keuntungan untuk tetap stabil.

Sukabumi masih menjadi bagian dari Cianjur pada masa itu. Sukabumi, pada masa itu, dikepalai oleh Raden Noh (Aria Wiradatu Datar IV/Bupati Cianjur) yang diangkat sebagai seorang patih. Sukabumi terdiri dari Distrik Gunungparang, Distrik Cimahi, Distrik Ciheulang, Distrik Cicurug, Distrik Jampang Tengah dan Distrik Jampang Kulon. Sukabumi berpusat di Cikole. Cikole yang dipilih sebagai

kepatihan karena jaraknya yang strategis antara Priangan dan Batavia. Selain itu, Cikole merupakan tempat yang nyaman untuk beristirahat (Tim, 1993, p.4).

Perubahan struktural dalam lembaga sosial kembali berubah semenjak kedatangan Daendels. Daendels merubah lembaga sosial dengan tidak memberikan kekuatan penuh dalam mengatur pekerjaan dan hasil pekerjaan penduduk. Daendels mendapat laporan dari van Hongendrop bahwa sistem feodal yang diterapkan di Sukabumi terlihat menyengsarakan penduduknya. Daendels menindaklanjuti laporan tersebut dengan mencabut kepemilikan dan penguasaan tanah oleh Bupati dan dikembalikan kepada penduduk Sukabumi (Jaya, 2002, p.45).

Daendels juga merubah bentuk interaksional untuk hubungan sosial penduduk di Priangan termasuk Sukabumi. Hal tersebut merubah komposisi penduduk menjadi lebih beragam. Daendels masuklah orang-orang Timur Asing ke Sukabumi berdasarkan *Besluit* 9 Juni 1810. Mereka didatangkan untuk membantu memberdayakan tanah-tanah kosong dalam menanam tembakau, nila, dan kapas (Kustedja, 2012, p.114). Di bawah pimpinan Daendels sikap pemerintah terhadap warga Timur Asing lebih lunak. Terutama warga Cina yang banyak menjadi pekerja dan pedagang.

Sukabumi mengalami perkembangan penduduk pada masa penjajahan Inggris di bawah Thomas Stamford Raffles. Thomas Stamford Raffles melakukan sensus penduduk. Sukabumi mempunyai hasil sensus yang telah dilakukan di distrik Gunung Parang. Di distrik Gunung Parang hasil sensus mencatat terdapat 590 desa dengan 3.569 laki-laki yang berprofesi petani, 3.600 wanita dengan profesi petani, 2.547 anak laki-laki petani dan 2.664 anak perempuan petani. Gunung Parang mempunyai populasi penduduk yang tercatat sejumlah 16.403 orang (Raffles, 2014, p.iv). Hasil sensus yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Inggris menunjukkan bahwa pekerjaan petani masih menjadi profesi penduduk Sukabumi.

Belanda kembali menata ulang ekonomi di Hindia Belanda setelah masa koloni Inggris. Belanda mempelajari kegagalan ekonomi pada masa kekuasaan VOC dengan menerapkan

kebijakan ekonomi yang tepat. Mereka memikirkan konsep ekonomi yang menguntungkan bagi negeri induk Belanda. Ide yang berhasil adalah menerapkan kebijakan *culturstelsel*. Sukabumi berkewajiban untuk menanam kopi, nila dan teh yang menjadi komoditas di Priangan pada masa tanam paksa (Jaya, 2002, p.39). Kolonial Belanda juga terlebih dahulu memperketat struktur interaksional di Hindia Belanda, selain akan menerapkan kebijakan baru.

Pemerintah kolonial memberlakukan kebijakan *Passenstelsel* dan *wijkenstelsel*. *Passenstelsel* diberlakukan pada 1816 dengan mengharuskan penduduk berbagai daerah perlu meminta surat jalan. Sementara *wijkenstelsel* diberlakukan pada tahun 1818 oleh pemerintah kolonial. Peraturan ini diberlakukan untuk mengatur dan memilih penanggungjawab ketertiban masing-masing kelompok etnis dengan pangkat kehormatan militer: *Luitenant*, *Mayor* dan *Kapitein* (Husain, 2013, p.25; Hadinoto, 1999).

Pemerintah kolonial Belanda menerapkan *Cultuurstelsel*. *Cultuurstelsel* di Sukabumi diberlakukan dengan menanam kopi sebagai komoditi utamanya (Jaya, 2002, p.39). Era tradisional masih menguasai tatanan ekonomi dan sosial di Sukabumi, pertumbuhan menuju modernisasi sangat lambat. Pada masa berikutnya modernisasi dan perubahan sosial ekonomi mengalami kemajuan di Sukabumi.

Pemerintah Kolonial Belanda melakukan beberapa eksperimen pada masa tanam paksa yang dilakukan di Sukabumi. Pemerintah Kolonial Belanda, pada tahun 1835, melalui Jacobsen mengembangkan budidaya teh. Beliau melakukan percobaan-percobaan di Sukabumi (Nugraha, 2017, p.427). Teh pada masa selanjutnya menjadi komoditi utama menggantikan kopi di Sukabumi karena perkebunan the tumbuh subur.

Kaum liberal bersimpati terhadap penderitaan dan kesengsaraan rakyat Hindia Belanda. Mereka berkampanye untuk merebut parlemen Belanda. Mereka berhasil menguasai parlemen dan menerapkan kebijakan liberal dengan membuka swastanisasi pada tahun 1870 dengan mengeluarkan *Agrarienschwet* (Undang-Undang Agraria tahun 1870). *Agrarienschwet* memicu perkembangan sosial

ekonomi menuju modernisasi di Sukabumi karena ekonomi liberal menjadi pemicu kapitalisme dan industrialisme (Kartodirjo, & Suryo, 1991, p.80). Sukabumi mempunyai dampak terbesar dalam penerapan swastanisasi. Sukabumi berkembang menjadi kawasan perkebunan teh, karet, getah percah, kopi dan nila.

Pemerintah kolonial Belanda menyambut kebijakan *Agrarianschwet* dengan merubah kembali bentuk struktural dalam segi administrasi karena potensi dan perkembangan Sukabumi masa sebelumnya yang cocok untuk investasi perkebunan. Pemerintah kolonial Belanda mengubah status wilayah Sukabumi pada tahun 1870 melalui *Staatsblad* No. 121 dengan menetapkan *Afdeeling* Sukabumi dan secara resmi pada 1 Januari 1871 diterapkan sehingga berpisah dengan Cianjur (Tim ANRI, 2013, p.5). Pemekaran wilayah Sukabumi menandakan kemajuan yang semakin pesat di Sukabumi. Pemekaran wilayah Sukabumi dikarenakan banyaknya perkebunan yang berdampak kepada berkembangnya wilayah dan pemisahan dari Cianjur. Pemisahan tersebut semakin dirasakan karena Sukabumi dapat mengatur daerahnya sendiri dan mempermudah investor untuk berinvestasi di Sukabumi.

Sukabumi membuka investasi perkebunan ke pengusaha swasta melalui serangkaian kebijakan-kebijakan. Sukabumi menjadi daya tarik karena tanahnya yang subur dan dapat mendukung industri perkebunan. Sukabumi berkembang menjadi wilayah perkebunan yang subur sejak tahun 1870. Sukabumi mempunyai perkebunan tersebar di empat distrik. Distrik terbesar terdapat di Pelabuhan dengan luas 2.885 bau (Hendarti, 2007, p.18).

Van Der Huct adalah pionir pengusaha perkebunan teh di Sukabumi dan Priangan. Beliau mengontrak tanah di Parakansalak dan Sinagar. Parakansalak dan Sinagar menjadi penghasil teh yang terkenal di dunia bahkan iklan teh Parakansalak bertebaran di media Eropa (Firmansyah, 2017, p.41). Van Der Huct memicu para pengusaha Eropa untuk menggarap perkebunan-perkebunan dalam skala besar maupun kecil di Sukabumi. Sukabumi mengalami pertumbuhan Ekonomi yang di topang oleh usaha perkebunan. Perkebunan memicu perputaran kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi berputar

diperkebunan dengan merekrut para pekerja, mengurus perizinan, membayar pajak, melakukan jual beli, mengimpor mesin-mesin dan sebagainya. Aktivitas perkebunan dunia mulai dirasakan di Sukabumi.

Soegijanto Padmo memetakan industri perkebunan teh di Jawa Barat dimana Sukabumi mempunyai 20 pabrik utama pengolahan. Pengolahan dari perkebunan dilakukan dengan ketat dan dengan manajerial yang baik. Pengolahan yang ketat dan baik memicu mobilisasi penduduk dengan memberikan kesempatan untuk bekerja sebagai pemetik, mengolah dan pengepakan teh dan mendapatkan gaji yang layak (Nurbaty & Saring, 2015, p.220).

Perkebunan di Sukabumi terdapat 474 perusahaan perkebunan. Perkebunan tersebut terdiri dari beragam komoditi yaitu teh, kina, karet, coklat, kapuk, kelapa, lada dan kopi. Perkebunan-perkebunan di Sukabumi disewa dengan rentang waktu kontrak 20 tahun sampai 75 tahun (Saring, Barkah & Husain, 2017, p.3). Perkebunan memicu era modern. Era modern segera menjadi kenyataan diakhir abad ke-19 dan diawal abad ke-20.

Warga Timur Asing yang datang ke Sukabumi mulai ramai setelah Undang-Undang Agraria diterapkan. Mereka datang untuk bekerja sebagai pekerja dan ahli perkebunan serta berdagang. Di luar itu mereka juga ada yang mendirikan perkebunan. Sampai tahun 1900an sekitar 28 perkebunan berdiri dan pemiliknya adalah warga Cina. Selain perkebunan mereka memiliki penggilingan padi. Di Sukabumi terdapat 15 penggilingan padi yang dimiliki warga Cina (Firmansyah, 2017, p.108). Persaingan dagang juga mejadi tidak sekaku sebelumnya. Era liberal sangat mengubah struktural kelas yang ada di Sukabumi. Kesempatan peluang untuk berinvestasi semakin terbuka sehingga banyak orang berdatangan ke Sukabumi.

Sukabumi yang semakin berkembang, merubah kembali bentuk struktural pemerintahannya dalam hal administrasi. Keputusan Gubernur Jenderal tanggal 16 Oktober 1882 *Staatsblad* No. 252 mengenai pembentukan *Onder District* membuat *Afdeeling* Sukabumi mempunyai beberapa *Onder District* disetiap distriknya (Tim ANRI, 2013, p.8). Perkembangan Sukabumi semakin nyata dengan mengatur lebih dalam skala

administrasi yang menandakan komposisi penduduk semakin meningkat.

Orang-orang Eropa mulai beramai-ramai datang ke Sukabumi setelah dicabutnya larangan membawa istri dan anak. Mereka mulai berbondong-bondong membawa istri dan anak-anaknya ke Sukabumi. Orang-orang Eropa pada waktu yang singkat meningkat tajam. Banyak pula dari mereka yang mempunyai selir atau nyai baik orang Sunda maupun orang Cina. Mereka kemudian beranak pinak dan bertempat tinggal rata-rata di Cikole yang menjadi pusat aktivitas perkotaan Sukabumi. Mereka enggan tinggal di desa-desa dan hanya menjadikannya tempat dalam pekerjaannya (Firmansyah, 2017, p.62). Keberagaman orang-orang yang tinggal menjadikan Sukabumi semakin merasakan perubahan dalam struktur interkasinya. Interaksi diantara mereka sangat dinamis dan tidak kaku karena tidak adanya peraturan yang membatasi pergerakan mereka.

Komposisi penduduk menjadi bertambah banyak di Sukabumi, terutama di daerah yang kelak menjadi kotapraja (*Gemeente*). Keberagaman latar belakang penduduk yang terdiri dari bangsa Pribumi, Eropa, dan Timur Asing menata kehidupan didalamnya terutama dipusat Kota Sukabumi. Masyarakat Kota Sukabumi yang dikepalai oleh seorang bangsa Eropa akhirnya menerapkan kota dengan konsep yang terkotak-kotak berdasarkan *Regering Regliments* 1854 (Winarta, 2008). Kotapraja Sukabumi dibagi menjadi tiga zona wilayah berdasarkan etnis. Adapun zona wilayah tersebut adalah sebagai berikut.

1. Zona Eropa berada di utara wilayah Kotapraja Sukabumi sebagai pemerintah dan penguasa.
2. Zona Timur asing berada di tengah Kotapraja Sukabumi sebagai penggerak ekonomi.
3. Zona Pribumi berada di selatan jalur kereta api atau stasiun Sukabumi. Mereka membuat perkampungan-perkampungan yang disebut *babakan*.

Struktural pembagian kelas berdasarkan wilayah, diberlakukan oleh Pemerintah Hindia Belanda awal tahun 1900 dengan alasan untuk memudahkan pencacahan. Pertumbuhan

komposisi penduduk yang besar secara signifikan adalah etnis Cina.

Perkembangan perkebunan membawa kemajuan teknologi terutama untuk mempercepat pengiriman hasil perkebunan dengan membangun jalur kereta api. Kereta api dibangun oleh Maarschalk dan Mijners, dua orang pejabat dari Belanda, menyarankan untuk membangun jalur kereta api melalui Sukabumi. Mereka berdua melakukan analisis dengan hasil kereta api dapat membantu ekonomi rakyat dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Hasil pertanian, peternakan dan perkebunan serta pertambangan dapat diangkut dengan kereta api. Pembangunan rel kereta api dimulai dengan disahkannya Undang-Undang pembangunan rel kereta api jalur Bogor-Sukabumi-Cianjur tanggal 6 Juni 1878 (Lasmiyati, 2017, p.208).

Perusahaan yang berhak untuk membangun sarana kereta api Buitenzorg-Sukabumi-Cianjur dilaksanakan oleh perusahaan kereta api pemerintah Belanda bernama *Staatspoorwagen* (SS). Inspektur yang bertanggungjawab mengawasi adalah Maarschalk. Bahan-bahan untuk membangun jalur kereta api disimpan di Buitenzorg (Lasmiyati, 2017, p.208).

Pembangunan lajur kereta api di Sukabumi tersebut terbagi ke dalam tiga tahap, yaitu tahap pertama pada tanggal 5 Oktober 1881 dari Bogor-Cicurug sepanjang 27 km. Tahap kedua 21 Maret 1882, Cicurug-Sukabumi sepanjang 31 km. Tahap ketiga tanggal 10 Mei 1883 dari Sukabumi ke Cianjur sepanjang 39 km. Pembangunan jalan kereta api mempekerjakan pekerja Cina dan Pribumi untuk membangun jalur rel kereta api yang menghubungkan Buitenzorg-Sukabumi-Cianjur. Pada tahun 1884, kereta api mulai dioperasikan dengan menggunakan lokomotif Seri B-50 pabrikan Manchester tahun 1880-1881 dengan kecepatan 60 km per jam. Pada jalur kereta api Sukabumi terdapat satu stasiun yaitu stasiun Sukabumi dan lima stasiun kecil (*halte*) yaitu Cicurug, Parung Kuda, Cibadak, Karang Tengah, dan Cisaat (Lasmiyati, 2017, p.208).

Pembangunan transportasi kereta api di Sukabumi bertujuan untuk mendukung perkembangan perkebunan-perkebunan teh swasta di *afdeeling* Sukabumi terutama sebagai

alat angkut hasil produksi. Hasil-hasil perkebunan dari Sukabumi bisa dikirim dengan mudahnya ke Pelabuhan Tanjung Priuk di Batavia. Stasiun terdekat yang bisa diakses oleh perkebunan-perkebunan teh di Sukabumi dengan mudah.

Transportasi kereta api berdampak kepada penambahan jumlah penduduk yang menempati area disekitar stasiun-stasiun. Mereka menempati lahan-lahan kosong berada disekitar stasiun atau pinggran rel kereta api. Ternyata hal tersebut membuka peluang lapangan pekerjaan. Sarana transportasi kereta api selain dibangun stasiun, juga gudang penyimpanan. Penduduk Sukabumi banyak yang kemudian terserap sebagai pekerja di tempat-tempat tersebut Di sekitar stasiun pemberhentian dibuka warung-warung dan lapak untuk berdagang yang lama kelamaan tumbuh menjadi pasar (Lasmiyati, 2017, p.209). Penduduk yang semakin lama bertambah diareal stasiun membuka perkampungan-perkampungan baru sehingga tumbuh konsentrasi penduduk dengan komposisi penduduk yang beragam.

Teknologi transportasi juga mengembangkan sektor pariwisata Sukabumi pada akhir abad ke-19. Sukabumi dikenal wisatawan untuk berburu hewan liar didaerah selatan Sukabumi. Sukabumi bagian utara mempunyai hotel-hotel dengan kualitas terbaik yaitu hotel Victoria, hotel Grand Selabatu, dan hotel Mooi Wanasari. Tarif dari hotel tersebut berkisar antara 6-20 Gulden dengan fasilitas yang tersedia adalah Golf, tenis dan kolam renang. Sukabumi menjadi destinasi wisata yang diunggulkan oleh pemerintah Hindia Belanda dengan dimasukan di dalam buku panduan wisata *Batavia, Buiternzorg end de Preanger Gids voor Bezoekers en Toeristen* karya Buys, Schulze, dan Bemmelen & Hooyer. Banyak pelaku perjalanan baik perseorangan maupun individu singgah di Sukabumi untuk menikmati pemandangan Alam (Sunjayadi, p.2019).

Faktor teknologi yang diakibatkan dari pembangunan jalur transportasi kereta api membawa dampak yang besar. Era modern di Sukabumi semakin terlihat. Penduduk dari luar Sukabumi baik Pribumi, Eropa maupun Timur Asing masuk ke Sukabumi untuk menetap ataupun berwisata. Kesenian Sukabumi mendapatkan kesempatan untuk tampil di kancah internasional.

Struktural pemerintahan kembali berubah dan mengusahakan agar Sukabumi yang berada di kawasan kota mengusahakan pemerintahan otonom. Warga Eropa yang mengeluh mengenai keadaan Sukabumi kota yang semakin padat. Mereka mulai mengharapkan adanya pemerintahan otonom sendiri. Mereka menghendaki agar wilayah Kota Sukabumi bisa diatur oleh bangsa Eropa. Akhirnya usul mereka yang diajukan kepada pemerintah Hindia Belanda dikabulkan dengan dirubahnya pasal 68 *Regeringsreglement 1854* (Firmansyah, 2017, p.62).

Mereka kemudian merintis *Gemeente* Sukabumi sejak terbitnya *Staatsblad* No. 80 pada 17 Maret 1891 dengan berdirinya *Onder Afdeeling* Sukabumi. Wilayahnya terdiri dari Cisarua, Salabintana, Kabandungan, Situ, Kramat, Gunungpuyuh, Nyomplong, Pabuaran, Baros, Gedong Panjang, Limusununggal dan Pelabuhanratu. Pada surat bertanggal 15 Januari 1913 yang ditujukan kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda, para pengusaha dan penduduk Sukabumi berkebangsaan Belanda dengan mengatasmakan Dewan Rakyat menyusun rekomendasi untuk mengubah Sukabumi menjadi *Burgerlijkbestuur* (Tim ANRI, 2013, pp.. 2 & 9).

Berdasarkan usulan tersebut pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1914 mengubah *Onder Afdeeling* Sukabumi menjadi *Gemeente* Sukabumi dengan status *Burgerlijkbestuur*. *Burgerlijkbestuur* sendiri dipimpin oleh seorang *Burgemeester*. Penetapan Sukabumi dalam tata pemerintahan kolonial sebagai sebuah kotapraja diundangkan dalam *Staatsblad* No. 310 Tahun 1914 dengan anggaran biaya yang diundangkan dalam *Staatsblad* No. 311 tahun 1914. Peraturan tersebut mulai berlaku efektif pada tanggal 1 April 1914.

Sementara status dari *Afdeeling* Sukabumi diperluas. Berdasarkan *Besluit* Gubernur Jenderal tanggal 7 Mei 1912 *Staatsblad* No. 356 tahun 1913 Sukabumi mengalami perubahan kembali dalam pembagian wilayah. Pembagian wilayah *Afdeeling* Sukabumi tersebut terbagi dalam enam *District* dan 41 *Onder District*. Keenam *District* tersebut adalah Sukabumi, Cibadak, Cicurug, Pelabuanratu, Jampang Tengah dan Jampang Kulon (Tim ANRI, 2013, p.8; Dutch East Indies, 1933, p.325).

Afdeeling Sukabumi menandai perubahan pada tahun 1914 dengan berubah menjadi *Regentschap*. Perubahan *Regentschap* ini menandai berpisahnya dari *Regentschap* Cianjur. Perubahan ini berdasarkan *Besluit* Gubernur Jenderal tanggal 25 April 1921 Nomor 71 dan mulai berlaku pada 1 Juni 1921. Pada tanggal 7 Juli 1921 diangkat Raden (Adipati Aria) Soeria Nata Brata sebagai Bupati Sukabumi.

Perubahan struktural lembaga sosial menandai kemajuan Sukabumi akibat dari berkembangnya swastanisasi di Sukabumi. Sukabumi berkembang menjadi *Gemeente* (kotapraja) yang dipimpin oleh *Burgermeester* dan *Regentschap* Sukabumi yang dikepalai oleh Bupati. Kotapraja Sukabumi dipimpin oleh orang berkebangsaan eropa dengan menerapkan tata kota berdasarkan pembagian kelas diwilayahnya. Sementara di *Afdeeling* Sukabumi dipimpin oleh Pribumi yang menjadi Bupati dan penduduk yang bertempat tinggal bercampur tanpa ada pembagian kelas. Namun penduduk Timur Asing banyak terkonsentrasi disekitar perkebunan dan sekitar stasiun.

Penjelasan data statistik dari informasi tertulis mengenai penduduk Kota Sukabumi dan Kabupaten Sukabumi menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Sampai dengan akhir tahun 1905, penduduk Sukabumi kota berjumlah 15.080 jiwa, hampir sepertiga dari penduduk Sukabumi Kabupaten. Penduduk Sukabumi kota terdiri dari tiga kelompok bangsa Eropa 588 jiwa, Pribumi 12.388 jiwa, dan penduduk Timur Asing 2.112 jiwa (Tim ANRI, 2013, p.7).

Pada tahun 1915 data statistik penduduk Sukabumi meningkat dengan signifikan dengan jumlah 43.500 jiwa. Bertambah dua kali lipat selama 10 tahun dari 1905. Jumlah tersebut terdiri dari 1.600 jiwa berkebangsaan Eropa, 3.500 jiwa berkebangsaan Cina dan Timur Asing lain, sedangkan sisanya Pribumi sebesar 28.400 jiwa. Data berdasarkan pekerjaan adalah 2.200 jiwa penduduk wilayah Sukabumi yang berkebangsaan Eropa berprofesi sebagai pengusaha perkebunan yang menguasai sekitar 27.022,42 Ha. Sejumlah 4.300 jiwa penduduk berkebangsaan Timur Asing berprofesi sebagai pedagang. Sementara itu sekitar 50.400 penduduk

Pribumi berprofesi sebagai petani (Tim ANRI, 2013, p.7).

Struktur interkasional di Sukabumi terlihat dari kelas-kelas sosial yang ada di Sukabumi. Konflik diantara penduduk yang mendiami mulai terlihat dari perlakuan diskriminatif. Sebagai etnis terbesar yang mendiami di Kotapraja Sukabumi para Pribumi sangat tertindas. Sebagai contoh di ruangan-ruangan tertentu seperti *Club Societei*, restoran mewah, gedung pemerintahan, hubungan antara bangsa Eropa dan etnis Sunda terlihat jelas. Penikmat ruangan adalah orang-orang Eropa dan etnis Sunda sebagai Pribumi hanya sebagai pembantu di tempat tersebut. Tidak semua orang Eropa menindas rakyat Pribumi. Ada beberapa diantara mereka yang berbaik hati terhadap Pribumi. Seperti pemilik perkebunan Kerkhoven yang membagikan sedekah bahkan bibit ke masyarakat Pribumi disekitarnya (Firmansyah, 2017, p.81).

Sentimen antara Pribumi dan Timur Asing terdapat di Sukabumi terutama dengan warga Cina. Stereotip warga Pribumi terhadap warga Cina terjadi ketika warga Cina ditunjuk untuk memungut pajak dari warga Pribumi. Pajak yang dipungut yaitu dari lapak pasar, kolam ikan, sarang burung walet, pemotongan hewan, candu dan pegadaian. Awalnya pembatasan itu diterapkan untuk melindungi masyarakat Pribumi dari praktik lintah darat. Tetapi, penunjukan warga Cina justru semakin menempatkan posisi mereka yang lebih berkuasa dari warga Pribumi (Usman, 2009; Dahana, 2000). Warga Timur Asing lainnya tidak terjadi seperti dengan warga Arab. Mereka diuntungkan dengan kesamaan kepercayaan terhadap Islam yang mayoritas dianut oleh warga Pribumi. Mereka menetap didaerah Tipar dan Warudoyong.

Perubahan sosial juga terjadi dalam kebudayaan melalui gaya berpakaian. Era modernisasi di Sukabumi membawa dampak bagi cara berpakaian yang tidak mencirikan etnis. Awalnya pakaian menjadi ajang untuk menonjolkan diri dan pembeda antar bangsa dan etnis. Kain sarung/selendang digunakan oleh Pribumi, jubah untuk orang Cina dan orang-orang Eropa menggunakan celana. Namun di Sukabumi banyak bangsa Eropa yang bahkan memakai sarung dan pakaian orang-orang Cina. Orang-orang Pribumi juga

memakai pakaian bangsa Eropa. (Firmansyah, 2017, p.81).

Rasionalitas berkembang melalui hadirnya kesadaran intelektual. Tan Ging Tiong yang mendirikan *Soekaboemische Snelpersdaruukkerij* dan menerbitkan harian Li Po pada Januari 1901. Pemimpin redaksi dari harian Li Po adalah Yoc Tjai Siang dan Tang Ging Tiong. Harian tersebut dianggap terbitan pertama dari nonBelanda di Indonesia. Munculnya perusahaan percetakan dan penerbitan yang ada di Sukabumi sangat membantu mempublikasikan Sukabumi ataupun daerah lainnya (Firmansyah, 2017, p.110). Sementara di kaum Pribumi muncul tokoh-tokoh intelektual seperti R. H. Ahmad Djoewaeni dan KH. Ahmad Sanusi.

Pada tahun 1920an R. H. Ahmad Djoewaeni mendirikan sekolah Islam bernama *Ahmadiaschool*. *Ahmadiaschool* diseleenggarakan secara klasikal. Disekolah tersebut diajarkan ilmu pengetahuan umum dan ilmu agama. Sekolah Islam lainnya yang terdapat di Sukabumi terutama di kotapraja adalah *Sakola Moehammadijah* yang berdiri tahun 1918. Pembeajaran dilakukan dengan klasikal yang memisahkan murid wanita dan laki-laki. Lembaga pendidikan Islam lainnya yang berdiri di kotapraja Sukabumi adalah Pesantren Syamsul Ulum yang melaksanakan pendidikan sampai pendidikan tinggi. Pesantren Syamsul Ulum didirikan oleh KH. Ahmad Sanusi. Di *Regentschap* Sukabumi lembaga pendidikan bercorak Islam banyak tersebar (Tim ANRI, 2013, pp.28-29).

Pendidikan Islam yang ada di Sukabumi berkembang ke arah intelektual untuk melepaskan diri dari belenggu penjajahan. KH. Ahmad Sanusi melawan penjajah dengan bergabung di SI dan mendirikan organisasi untuk berjuang melawan ketidakadilan kolonial.

Sekolah-sekolah yang didirikan menjadi tanda perkembangan intelektual. *Froebelsschool*, *Vervolgschool*, *Wilhelminaschool*, *Juliana School*, *Algemeene Lagere School*, dan *Hollandssch Inlandsche School* (HIS), Sekolah Puteri Santa Ursula, Sekolah Pertanian, dan Sekolah Polisi. Sekolah tinggi juga didirikan dengan nama *Instituut Soekaboemi* (Tim ANRI, 2013, pp.24-25 & pp.168-175).

Pendidikan bagi penduduk Sukabumi menjadi sarana yang baik bagi perkembangan

intelektual penduduk. Dinamika penduduk baik di kotapraja dan *Regentschap* Sukabumi menjadi dinamis akibat perkembangan modernisasi dari perubahan sosial dan ekonomi yang terjadi. Sukabumi mempunyai peran yang cukup besar dalam masa kolonial Belanda. Sektor perkebunan menjadi jalan untuk modernisasi dan perubahan sosial ekonomi masyarakat.

Simpulan

Perubahan sosial ekonomi dan proses modernisasi di Sukabumi terjadi karena beberapa faktor. Faktor utama adalah kondisi alam, penemuan-penemuan baru, dan teknologi. Sementara faktor pendukung adalah komposisi penduduk, konflik dimasyarakat dan kontak dengan masyarakat lain.

Bentuk perubahan sosial yang ada di Sukabumi adalah bentuk struktural, bentuk kultural dan bentuk interaksional. Bentuk struktural yang berubah di Sukabumi masa kolonial Belanda adalah pada kelas sosial dan bidang struktur administrasi pemerintahan. Perubahan kultural pada bentuk perubahan profesi dan gaya berpakaian. Sementara perubahan bentuk interkasional mengacu kepada hubungan sosial.

Modernisasi di Sukabumi terjadi dalam bidang budaya, politik, ekonomi, sosial dan *life style*. Pada hal budaya mereka menjadi konsumtif. Pada bidang politik terdapat dua perkembangan yaitu dalam struktur pemerintahan dan hadirnya sosok penentang kolonial Belanda. Pada bidang ekonomi masyarakat menjadi mengenal pekerjaan diluar pertanian. Pada bidang sosial penduduk Sukabumi dapat berinteraksi dengan etnis lainnya. Gaya hidup penduduk Sukabumi menjadi berubah pada gaya berpakaian. Intelektualisme juga berkembang di Sukabumi dengan banyaknya sekolah-sekolah dari tingkat dasar hingga tinggi untuk mendukung intelektualisme, rasionalitas, universalisme dan spesialisasi fungsional serta tingkat pendidikan. Sukabumi mempunyai peran yang cukup besar dalam masa kolonial Belanda. Sektor perkebunan menjadi jalan untuk modernisasi dan perubahan sosial ekonomi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Arsip

- Dutch East Indies.
 (1933). *Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-Indië*. Landsdrukkerij.
Staatsblad Van Nederlandsch-Indie. (1914).
 No. 310. DECENTRALISATIE. *Instelling van een gemeenteraad van Soekaboemi*.
Staatsblad Van Nederlandsch-Indie. (1914).
 No. 311. DECENTRALISATIE. *Vaststelling van de eerste bergrooting voor de gemeente Soekaboemi*.

Jurnal/ Hasil Penelitian

- Dahana, A. (2000). Kegiatan Awai Masyarakat Tionghoa di Indonesia. *Wacana*, Vol. 2, No. 1, (pp. 54-72) from: <https://doi.org/10.17510/24076899-00201004>.
- Fajarani, Annisa. (2012). *Peranan Pergoeroean Sjamsol Oeloem dalam Mempetahankan Kemerdekaan Republik Indonesia di Sukabumi (1945-1946)*. (Skripsi Sarjana. Universitas Negeri Yogyakarta).
- Handayani, Sri Ana. (2017). Geliat Ekonomi Masyarakat Priangan Era Pemerintahan Hindia Belanda 1900-1942. *Lembaran Sejarah*. Vol. 13, No. 2, (pp.221-234).
- Handinoto, H. (1999). "Lingkungan" Pecinan" dalam Tata Ruang Kota di Jawa Pada Masa Kolonial. *DIMENSI (Journal of Architecture and Built Environment)*. Vol. 27, No. 1, (pp.20-29), from: <https://doi.org/10.9744/dimensi.27.1>
- Hardjasaputra, A. Sobana. (2003). Perubahan Sosial di Bandung 1810-1906. *Sosiohumaniora*. Vol. 5, No. 1, (pp.96-107).
- Hatu, Rauf. (2011). Perubahan Sosial Kultral Masyarakat Pedesaan (Suatu Tinjauan Teoritik-Empirik). *Jurnal Inovasi*. Vol. 8, No. 4, (pp.1-11), from: <https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/JIN/article/view/721>.
- Husain, S. B. (2013). Kesatuan dalam Keberagaman: Pasang Surut Pembauran Orang-orang Tionghoa di Surabaya. *LITERASI: Indonesian Journal of Humanities*. Vol. 3, No. 1, (pp.21-28), retrieved from: <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/LIT/article/view/6108>.
- Kustedja, S. (2012). Jejak komunitas Tionghoa dan perkembangan kota Bandung. *Jurnal Sositoteknologi*. Vol. 11, No. 26, (pp.105-115), retrieved from: <http://journals.itb.ac.id/index.php/sostek/article/view/1095>.
- Lasmiyati. (2017). "Trasnportasi Kereta Api di Jawa Barat Abad ke-19 (Bogor-Sukabumi-Bandung)". *Patanjala*. Vol. 9, No. 2, (pp.197-212), from: <https://dx.doi.org/10.30959/patanjala.v9i2.21>.
- Lestari, Puji. (2008). Analisis Perubahan Sosial pada Masyarakat Samin (Studi Kasus di Desa Mendenrejo, Kecamatan Kradenan, Blora). *Dimensia*. Vol. 2, No. 2, (pp.20-31), retrived from: <https://journal.uny.ac.id/index.php/dimensia/article/view/3403>.
- Mulyadi, Muhammad. (2015). Perubahan Sosial Masyarakat Agraris ke Masyarakat Industri dalam Pembangunan Masyarakat di Kecamatan Tamalate Kota Makassar. *Jurnal Bina Praja*. Vol. 7, No. 4, (pp.311-322), from: <https://doi.org/10.21787/jbp.07.2015.311-321>.
- Nugraha, Setia. (2017). Kota Sukabumi: Dari Distrik Menjadi *Gementee* (1815-1914). *Patanjala*. Vol. 9, No 3, (pp.423-438), from: <https://dx.doi.org/10.30959/patanjala.v9i3.35>.
- Nurbaity & Saring. (2015). "Swastanisasi Perkebunan Teh di Bogor 1905-1942". *Sosio-E-Kons*. Vol. 7, No. 3, (pp.216-225), from: <http://dx.doi.org/10.30998/sosioekons.v7i3.698>.
- Rahmayanti, Yunita Dwi., & Pinasti, V. Indah Sri. (2017). Dampak Keberadaan Objek Wisata Waduk Sermo terhadap Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat di Sermo, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Pendidikan Sosiologi*. (pp.1-15), retrived from:

- <https://eprints.uny.ac.id/53258/6/jurnal%2013413244005.pdf>.
- Rosana, Ellya. (2015). Modernisasi dalam Prespektif Perubahan Sosial. *Al-Adyan Jurnal Lintas Agama*. Vol. 10, No. 1, (pp.67-81), from: <https://doi.org/10.24042/ajsia.v10i1.1423>.
- Saring, Barkah, Husin. (2017). “Diantara Bayang-Bayang Eksploitasi Perkebunan dan Involusi Pertanian”. (*Artikel Laporan Ilmiah*. Universitas Indraprasta PGRI).
- Suryanegara, Ellen., Suprajaka., Nahib, Irmadi. (2015). Perubahan Sosial pada Kehidupan Suku Bajo: Studi Kasus di Kepulauan Wakatobi, Sulawesi Tenggara. *Majalah Globe*. Vol. 17, No. 1, (pp. 67-78), retrived from: <https://core.ac.uk/download/pdf/291853770.pdf>.
- Utami, Indah Wahyu Puji. (2015). Monetisasi dan Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat Jawa Abad XIX. *Sejarah dan Budaya*. Vol. 9, No. 1, (pp.51-62).
- Zakaria, Mumuh Muhsin. (2011). Dinamika Sosial Ekonomi Priangan Abad Ke-19. *Sosiohumaniora*. Vol. 13, No. 1, (pp.96-107), from: <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v13i1.5464>.
- Firmasnsyah, Irman. (2016). *Soekaboemi The Untold Story Kisah di Balik Sejarah Sukabumi*. Jakarta: Mer C Publishing.
- _____. (2017). *Kota Sukabumi Menelusuri Jejak Masa Lalu*. Sukabumi: Paguyuban Soekaboemi Heritages.
- Hendarti, Latipah. (2007). *Menepis Kabut Halimun: Rangkaian Bunga Rampai Pengelolaan Sumberdaya Alam*. Jakarta: Obor.
- Jaya, Ruyatna. (2002). *Sejarah Sukabumi*. Tanpa Tahun Sukabumi: Yayasan Pendidikan Islam.
- Melly, G. Tan. (1963). *The Chinese of Sukabumi: a Study in Social and Cultural Accomodation*. New York: Ithaca.
- Neolaka, Amos. (2019). *Isu-isu Kritis Pendidikan: Utama dan tetap Penting Namun Terabaikan*. Jakarta: Kencana.
- Raffles, Thomas Stamford. 2014. *The History of Java*. Yogyakarta: Narasi. Cet IV.
- Sunjayadi, Achmad. (2019). *Pariwisata di Hindia Belanda 1891-1942*. Jakarta: Gramedia.
- Tim ANRI. (2013). *Sukabumi dalam Arsip*. Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia.
- Winarta, Frans H. (2008). No More Discrimination Againts The Chinese. *Ethnic Chinese in Contemporary Indonesia*. (pp.57-73). Singapore: Utopia Press.

Buku